



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-
UNDANG NO. 27 TAHUN 1953, LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1953 NO. 77)

Presiden Republik Indonesia.

- Menimbang : a. Bahwa dalam masyarakat dewasa ini ada kekurangan beberapa jenis uang logam sehingga perlu diatur pengeluarannya.
- b. Bahwa "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No. 77) hanya mengatur pengeluaran uang logam dari aluminium sampai dua puluh lima sen dan dari nekel lima puluh sen;
- c. Bahwa pembuatan uang logam dari nekel dewasa ini mengalami kesulitan dan karena itu harus diganti dengan logam lain.
- d. Bahwa selain uang logam yang telah beredar perlu dikeluarkan jenis uang logam yang lebih tinggi, sebagai ganti uang kertas Pemerintah yang sekarang beredar dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50.
- e. Bahwa karena itu perlu "Undang-undang Mata Uang tahun 1953 (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.77) diubah;
- f. Bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak peraturan tersebut perlu segera diadakan
- Mengingat : Pasal-pasal 96 dan 109 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-92 pada tanggal 25 Maret 1958.

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Undang-undang Darurat tentang pengubahan "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.77).

Pasal I.

Pasal 5 "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No.27 tahun 1953, Lembaran-Negara tahun 1953 No.77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:

“Pasal 5.

- (1) Uang logam Indonesia yang sah adalah
 - a. Dari aluminium: uang satu sen, uang lima sen, uang sepuluh sen, uang dua puluh lima sen, uang lima puluh sen.
 - b. Dari aluminium brons: uang satu rupiah, uang dua setengah rupiah.Mata-uang-mata-uang ini mempunyai sifat alat pembayar yang sah sampai jumlah yang akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Uang logam lima puluh sen dari nekel yang masih beredar berdasarkan Undang-undang No. 27 tahun 1953 tetap dianggap sebagai uang logam yang sah.

(3) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Menteri Keuangan berhak melanjutkan pengeluaran uang kertas Pemerintah dari Rp. 1,- dan Rp. 2,50 sebagai tindakan peralihan, sampai didalam peredaran ada cukup uang logam menurut ayat 1 sub b pasal ini.
- (4) Jumlah peredaran tiap-tiap tahun diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal II.

Pasal 6 "Undang-undang Mata Uang tahun 1953" (Undang-undang No. 27 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No. 77) diubah seluruhnya sehingga berbunyi:

“Pasal 6.

Banyaknya pembuatan masing-masing jenis uang logam untuk tiap-tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal III.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang tentang pengubahan Undang-undang Mata Uang tahun 1953" dan mulai beriak pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 30 April 1958
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEKARNO

Menteri Keuangan,
ttd
SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan
pada tanggal 2 Mei 1958.
Menteri Kehakiman,
ttd
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 46



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1958

tentang

PENGUBAHAN "UNDANG-UNDANG MATA UANG TAHUN 1953" (UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1953. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 No. 77).

UMUM.

Pada dewasa ini beredar uang logam dari aluminium satu sen, lima sen, sepuluh sen, dua puluh lima sen dan uang logam nekel dari lima puluh sen.

Pembuatan uang logam dari nekel mengalami kemacetan oleh karena bahannya (nekel) sukar sekali di dapat dewasa ini, padahal mata uang ini sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Karena itu kebutuhan ini perlu segera dipenuhi.

Selain dari pada itu, berhubung dengan perkembangan keuangan dewasa ini perlu dikeluarkan uang logam yang lebih tinggi dari pada lima puluh sen, yaitu satu rupiah dan dua rupiah setengah.

Uang logam ini akan lebih tahan lama dalam peredaran dari pada uang kertas Pemerintah.

Uang kertas ini akan ditarik dari peredaran jika telah ada cukup uang logam beredar dalam masyarakat.

Mengingat kebutuhan masyarakat maka pembuatan uang-uang logam ini perlu segera dilakukan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal I.

Uang logam yang akan dikeluarkan dibuat dari aluminium dan dari aluminium brons.

Uang logam dari nekel yang sekarang beredar tetap dianggap sebagai uang sah. Di samping ini akan dikeluarkan uang logam lima puluh sen dari aluminium.

Pasal II. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal II.

Cukup jelas.

Berhubung dengan telah berdirinya percetakan uang logam di Kebayoran yang diberi nama Perusahaan Negara Arta Yasa, maka pembuatan uang logam akan dilakukan pada perusahaan tersebut.

Pasal III.

Tidak memerlukan penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 46 tahun 1958.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttt

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1572